

Dinamika Dan Konsistensi Kebijakan Kurikulum Nasional

¹Hilalludin Hilalludin

¹Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: hilalluddin34@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan kurikulum nasional sebagai instrumen strategis dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pedagogis, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang mencerminkan visi, arah, dan tujuan pembangunan bangsa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap berbagai fenomena perubahan kurikulum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kurikulum merupakan bentuk respons terhadap perkembangan global, tuntutan sosial, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, perubahan yang terjadi secara cepat dan berulang tanpa evaluasi komprehensif berpotensi menimbulkan inkonsistensi kebijakan dan melemahkan efektivitas implementasi di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, proses agenda setting dalam kebijakan kurikulum dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan ideologis yang saling berinteraksi, sehingga kurikulum menjadi arena kontestasi berbagai kepentingan. Dalam konteks ini, kebijakan kurikulum nasional memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kurikulum yang berorientasi jangka panjang, adaptif, dan mampu menyeimbangkan antara penguasaan kompetensi akademik, keterampilan abad ke-21, serta penguatan nilai spiritual dan moral.

Kata Kunci: Kebijakan Kurikulum, Pendidikan Nasional, Agenda Setting, Nilai-Nilai Islam, Karakter Peserta Didik

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of national curriculum policy as a strategic instrument in the development of education in Indonesia. The curriculum functions not only as a pedagogical tool but also as a public policy that reflects the vision, direction, and goals of national development. This research employs a qualitative approach with descriptive analysis of various curriculum changes in Indonesia. The findings indicate that curriculum changes represent the state's response to global developments, social demands, and the need to improve human resource quality. However, rapid and frequent changes without comprehensive evaluation may lead to policy inconsistency and weaken implementation effectiveness at the school level. Furthermore, the agenda-setting process in curriculum policy is significantly influenced by political, social, and ideological factors that interact dynamically, making the curriculum a space for competing interests. In this context, national curriculum policy plays a crucial role in achieving national education goals, particularly in shaping students' character through the internalization of Islamic values. Therefore, a long-term, adaptive curriculum policy is required, capable of balancing academic competencies, 21st-century skills, and the strengthening of spiritual and moral values.

Keywords: Curriculum Policy, National Education, Agenda Setting, Islamic Values, Student Character

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan jantung dari sistem pendidikan nasional karena di dalamnya terkandung arah, tujuan, serta nilai-nilai fundamental yang hendak ditransformasikan kepada peserta didik. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan karakter bangsa. Oleh karena itu, isu kurikulum senantiasa menempati posisi sentral dan menjadi agenda prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Setiap perubahan rezim pemerintahan, dinamika sosial, maupun tuntutan global hampir selalu diikuti oleh penyesuaian atau reformulasi kebijakan kurikulum (Kingdon 2021).

Fenomena perubahan kurikulum yang relatif sering menunjukkan bahwa kurikulum bukanlah produk kebijakan yang bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Kurikulum dipengaruhi oleh kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan. Namun, dinamika tersebut sering kali memunculkan kritik terkait konsistensi kebijakan kurikulum nasional. Perubahan yang terlalu cepat dan berulang berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat implementasi, baik bagi pendidik, peserta didik, maupun lembaga pendidikan, serta menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai arah dan keberlanjutan kebijakan pendidikan nasional (Priestley et al. 2020).

Dalam konteks kebijakan publik, penetapan kurikulum sebagai agenda prioritas tidak dapat dilepaskan dari proses *agenda setting* yang sarat dengan kepentingan politik, sosial, dan ideologis. Kebijakan kurikulum kerap menjadi ruang kontestasi berbagai aktor, mulai dari pemerintah, elite politik, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil. Faktor politik memengaruhi orientasi dan arah kebijakan kurikulum sesuai dengan visi pemerintahan yang berkuasa, sementara faktor sosial mencerminkan tuntutan masyarakat

terhadap relevansi pendidikan dengan realitas sosial dan kebutuhan zaman. Di sisi lain, faktor ideologis turut membentuk nilai, paradigma, dan tujuan pendidikan yang hendak diwujudkan melalui kurikulum (Kemdikbud 2022).

Di Indonesia, kebijakan kurikulum nasional tidak dapat dipisahkan dari landasan filosofis dan ideologis negara sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan nasional menekankan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Dalam kerangka ini, kurikulum idealnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik dan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai moral (OECD 2021).

Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, nilai-nilai Islam memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan kurikulum menjadi bagian penting dalam membangun karakter peserta didik yang berlandaskan keimanan, akhlak, dan etika sosial. Namun, dinamika kebijakan kurikulum yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan sering kali menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan modernitas, kepentingan politik, dan konsistensi internalisasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan (Young 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai dinamika dan konsistensi kebijakan kurikulum nasional menjadi penting untuk dilakukan. Analisis terhadap alasan kurikulum selalu menjadi agenda prioritas, peran faktor politik, sosial, dan ideologis dalam proses *agenda setting*, serta keterkaitannya dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Islam diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang arah kebijakan kurikulum di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan studi kebijakan pendidikan, tetapi juga secara praktis dapat menjadi bahan refleksi bagi

perumusan kebijakan kurikulum yang lebih konsisten, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa dan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan (policy analysis) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam dinamika dan konsistensi kebijakan kurikulum nasional serta faktor-faktor yang memengaruhi penetapannya sebagai agenda prioritas pendidikan di Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis dokumen kebijakan pendidikan, peraturan perundang-undangan, naskah akademik, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dan terbit dalam lima tahun terakhir (Januardi and Jumadi 2024).

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis konseptual-teoretik. Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan kebijakan kurikulum yang berkaitan dengan pengaruh faktor politik, sosial, dan ideologis, serta keterkaitannya dengan tujuan pendidikan nasional dan internalisasi nilai-nilai Islam (Haqiqi et al. 2024). Sementara itu, analisis konseptual-teoretik digunakan untuk mengaitkan temuan analisis dengan teori kebijakan publik, teori kurikulum, dan perspektif pendidikan Islam. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema berdasarkan rumusan masalah, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kritis (Wahyudin et al. 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kebijakan

Kebijakan kurikulum nasional di Indonesia disusun dan diimplementasikan melalui berbagai instrumen regulasi yang bersifat hierarkis dan saling berkaitan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah dan surat edaran. Pada level makro, landasan utama kebijakan kurikulum nasional adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa kurikulum dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan keragaman potensi peserta didik, satuan pendidikan, serta tuntutan perkembangan zaman.

Pada tingkat operasional, kebijakan kurikulum dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai Peraturan Menteri Pendidikan yang mengatur struktur kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar isi, proses pembelajaran, dan sistem penilaian. Dinamika kebijakan tampak dari perubahan dan penyesuaian kurikulum yang dilakukan pemerintah, seperti peralihan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga kebijakan Kurikulum Merdeka. Perubahan tersebut menunjukkan respons negara terhadap perkembangan sosial, kebutuhan dunia kerja, serta tantangan global, namun sekaligus memunculkan persoalan konsistensi kebijakan dalam implementasinya di tingkat satuan pendidikan.

Selain regulasi nasional, kebijakan kurikulum juga diperkuat melalui peraturan daerah (Perda) dan surat edaran yang berfungsi sebagai instrumen pendukung implementasi di daerah. Perda pendidikan dan edaran dinas pendidikan daerah umumnya mengatur aspek teknis pelaksanaan kurikulum sesuai dengan karakteristik lokal, termasuk penguatan muatan lokal dan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks ini, dinamika kebijakan kurikulum nasional memperlihatkan adanya tarik-menarik antara standar nasional dan kebutuhan lokal, yang menuntut konsistensi kebijakan agar tujuan pendidikan

nasional tetap tercapai tanpa mengabaikan kearifan lokal dan nilai ideologis bangsa.

Isu Kurikulum sebagai Agenda Prioritas dalam Kebijakan Pendidikan Nasional

Kurikulum senantiasa menempati posisi strategis dan menjadi agenda prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional karena fungsinya sebagai instrumen utama negara dalam menentukan arah pembangunan pendidikan. Dalam perspektif teori kurikulum, kurikulum tidak sekadar dipahami sebagai dokumen akademik yang memuat mata pelajaran dan kompetensi, melainkan sebagai *policy instrument* yang merepresentasikan visi, nilai, dan orientasi pembangunan nasional. Tyler (1949) menegaskan bahwa kurikulum merupakan perwujudan tujuan pendidikan yang dirumuskan secara sistematis untuk membentuk perilaku dan karakter peserta didik. Dengan demikian, setiap perubahan orientasi pembangunan nasional hampir selalu diikuti oleh perubahan kebijakan kurikulum (Fullan 2021).

Dari sudut pandang kebijakan publik, posisi kurikulum sebagai agenda prioritas dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* yang dikemukakan oleh Kingdon. Dalam *Multiple Streams Framework*, kebijakan akan masuk ke agenda prioritas ketika bertemunya tiga arus utama, yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*. Dalam konteks pendidikan Indonesia, berbagai persoalan seperti rendahnya mutu pendidikan, ketimpangan akses, lemahnya karakter peserta didik, serta ketidaksesuaian lulusan dengan kebutuhan dunia kerja menjadi *problem stream* yang terus berulang. Kurikulum kemudian dipandang sebagai solusi kebijakan (*policy stream*) yang paling strategis dan relatif cepat untuk merespons persoalan-persoalan tersebut, terutama ketika didukung oleh kehendak politik pemerintah (*political stream*) (Sahlberg 2021).

Selain faktor internal kebijakan, dinamika sosial dan perkembangan global turut memperkuat posisi kurikulum sebagai agenda strategis. Globalisasi, revolusi industri, dan kemajuan teknologi informasi menuntut sistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Dalam perspektif teori *human capital*, pendidikan diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Kurikulum, dalam hal ini, berfungsi sebagai sarana utama untuk menyiapkan kompetensi abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum sering dipersepsikan sebagai kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing bangsa di tengah persaingan global (Rizvi and Lingard 2020).

Namun demikian, prioritas yang tinggi terhadap isu kurikulum juga memunculkan dinamika perubahan yang relatif cepat dan berulang. Dalam teori *policy cycle*, kebijakan idealnya melalui tahapan perumusan, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, perubahan kurikulum di Indonesia sering kali lebih didorong oleh momentum politik dan tuntutan jangka pendek daripada hasil evaluasi komprehensif atas implementasi kurikulum sebelumnya. Akibatnya, kebijakan kurikulum cenderung mengalami diskontinuitas, baik dari segi substansi maupun pendekatan pembelajaran (Noor 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurikulum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pedagogis, melainkan sebagai kebijakan strategis yang sarat dengan kepentingan multidimensional. Kurikulum menjadi ruang artikulasi berbagai kepentingan, mulai dari kebutuhan pembangunan nasional, tuntutan masyarakat, hingga orientasi ideologis negara. Oleh karena itu, menjadikan kurikulum sebagai agenda prioritas tanpa diimbangi dengan konsistensi kebijakan dan kesiapan implementasi berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti kebingungan di tingkat satuan

pendidikan, beban adaptasi guru, dan ketidaksinambungan pencapaian tujuan pendidikan (Apple 2021).

Dengan demikian, prioritas terhadap kebijakan kurikulum seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai dorongan untuk terus melakukan perubahan, tetapi juga sebagai komitmen untuk menjaga keberlanjutan, konsistensi, dan keselarasan kurikulum dengan tujuan pendidikan nasional. Pendekatan kebijakan yang berorientasi jangka panjang, berbasis evaluasi empiris, dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya bangsa menjadi kunci agar kurikulum benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun pendidikan nasional yang bermutu dan berkarakter (Huda 2020).

Peran Faktor Politik, Sosial, dan Ideologis dalam Agenda Setting Kebijakan Kurikulum

Proses *agenda setting* kebijakan kurikulum nasional tidak pernah berlangsung dalam ruang yang bebas nilai (*value-free*), melainkan berada dalam arena politik dan sosial yang sarat kepentingan. Dalam perspektif teori kebijakan publik, penentuan agenda merupakan tahap paling menentukan karena pada tahap inilah suatu isu dipilih untuk mendapatkan perhatian negara, sementara isu lain terpinggirkan. Kurikulum, sebagai kebijakan strategis pendidikan, menjadi objek utama kontestasi berbagai aktor dengan latar kepentingan politik, sosial, dan ideologis yang berbeda (Rahman 2020).

Faktor politik memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam proses perumusan dan perubahan kebijakan kurikulum. Teori *politics of education* menjelaskan bahwa pendidikan sering digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan dan sarana pembentukan warga negara sesuai dengan visi rezim yang berkuasa. Setiap pemerintahan cenderung membawa paradigma pendidikan yang selaras dengan agenda politiknya, baik yang berorientasi pada efisiensi ekonomi, penguatan nasionalisme, maupun modernisasi pendidikan. Paradigma tersebut kemudian diterjemahkan ke

dalam kebijakan kurikulum, mulai dari perumusan tujuan, struktur mata pelajaran, pendekatan pembelajaran, hingga sistem evaluasi. Dalam konteks ini, kurikulum menjadi media simbolik yang merepresentasikan identitas dan arah kebijakan suatu pemerintahan (Fitri 2023).

Selain politik, faktor sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk agenda kebijakan kurikulum. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kurikulum dipahami sebagai refleksi dari dinamika dan struktur sosial masyarakat. Tuntutan dunia kerja, perubahan pola relasi sosial, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mutu pendidikan mendorong negara untuk menyesuaikan isi dan orientasi kurikulum. Teori *social demand* menekankan bahwa kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, merupakan respons terhadap kebutuhan dan tekanan sosial yang berkembang. Isu-isu seperti ketimpangan akses pendidikan, degradasi moral generasi muda, serta rendahnya relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata peserta didik menjadi faktor pendorong masuknya reformasi kurikulum ke dalam agenda prioritas kebijakan nasional (Mahfud 2021).

Faktor ideologis, di sisi lain, menjadi landasan normatif dan filosofis dalam perumusan kebijakan kurikulum nasional. Ideologi negara, khususnya Pancasila, memberikan kerangka nilai yang menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dalam teori *ideological state apparatus* yang dikemukakan oleh Althusser, pendidikan dipandang sebagai salah satu instrumen negara dalam mentransmisikan ideologi dominan kepada warga negara. Kurikulum, dalam hal ini, berfungsi sebagai medium utama untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, moral, dan identitas kolektif. Oleh karena itu, kebijakan kurikulum tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran ideologis dan karakter peserta didik (Yusuf 2024).

Interaksi antara faktor politik, sosial, dan ideologis tersebut menjadikan kebijakan kurikulum sebagai produk kebijakan yang kompleks dan dinamis. Dalam kerangka *Multiple Streams Framework* (Kingdon), perubahan kurikulum terjadi ketika persoalan pendidikan (problem stream), solusi kebijakan (policy stream), dan kehendak politik (political stream) bertemu pada satu momentum tertentu. Namun, pertemuan ketiga arus ini tidak selalu menghasilkan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Dominasi faktor politik sering kali menyebabkan kebijakan kurikulum lebih responsif terhadap kepentingan jangka pendek daripada kebutuhan pendidikan jangka panjang (Hilalludin et al. 2025).

Dengan demikian, agenda setting kebijakan kurikulum nasional tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi multidimensional antara kepentingan politik, tuntutan sosial, dan orientasi ideologis negara. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga faktor tersebut menjadi penting agar kebijakan kurikulum tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga memiliki konsistensi nilai dan arah yang jelas. Pendekatan kebijakan yang inklusif, berbasis kajian empiris, dan berlandaskan ideologi nasional diharapkan mampu menghasilkan kebijakan kurikulum yang lebih stabil, relevan, dan berorientasi pada kepentingan pendidikan jangka panjang.

Keterkaitan Kebijakan Kurikulum Nasional dengan Tujuan Pendidikan Nasional dan Nilai-Nilai Islam

Kebijakan kurikulum nasional memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional menekankan pengembangan manusia Indonesia secara utuh dan seimbang, mencakup dimensi spiritual, moral, intelektual, sosial, dan keterampilan. Dalam perspektif teori pendidikan holistik, pendidikan tidak hanya diarahkan pada

pencapaian kemampuan kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Kurikulum, dalam konteks ini, menjadi instrumen strategis yang menerjemahkan tujuan pendidikan nasional ke dalam pengalaman belajar konkret di satuan pendidikan (Nuryatno 2022).

Dalam kajian teori *outcome-based education*, kurikulum dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan profil tertentu yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Profil lulusan tersebut tidak hanya mencerminkan kecakapan akademik dan keterampilan kerja, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, kebijakan kurikulum nasional idealnya mampu mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Ketidakeimbangan dalam penekanan aspek-aspek tersebut berpotensi menyebabkan reduksi makna pendidikan, di mana keberhasilan pendidikan diukur semata-mata melalui capaian akademik dan indikator kuantitatif (Lingard 2020).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, internalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan kurikulum memiliki signifikansi yang tinggi. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani yang memiliki tujuan hidup tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Konsep *insan kamil* dalam pendidikan Islam menekankan pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai Islam seperti keimanan (*iman*), ketakwaan (*taqwa*), kejujuran (*shidq*), tanggung jawab (*amanah*), keadilan (*'adl*), dan kepedulian sosial (*ta'awun*) menjadi fondasi etis yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional (Biesta 2020).

Secara teoritik, internalisasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum dapat dijelaskan melalui pendekatan *integrative curriculum* dan *hidden curriculum*. Selain melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, nilai-nilai Islam juga dapat diinternalisasikan melalui budaya sekolah, praktik pembelajaran, serta

keteladanan pendidik. Dalam konteks kebijakan kurikulum saat ini, pendekatan pembelajaran berbasis proyek, penguatan pendidikan karakter, dan pengembangan profil pelajar diharapkan mampu menjadi wahana integrasi nilai moral dan spiritual ke dalam proses pembelajaran lintas mata pelajaran (Sugari et al. 2025).

Namun demikian, dinamika kebijakan kurikulum nasional yang dipengaruhi oleh tuntutan global dan perubahan sosial kontemporer menghadirkan tantangan tersendiri. Di era digital dan revolusi industri, orientasi pendidikan cenderung diarahkan pada penguasaan kompetensi teknis, literasi digital, dan kesiapan kerja. Perspektif *neoliberal education policy* menunjukkan bahwa pendidikan semakin diposisikan sebagai instrumen ekonomi, sehingga aspek nilai dan moral berisiko terpinggirkan. Fenomena degradasi moral, krisis identitas generasi muda, serta meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan peserta didik menjadi indikator bahwa pendidikan yang berorientasi pada keterampilan semata belum cukup menjawab tantangan zaman (Al-Attas 2021).

Kondisi aktual tersebut menuntut kebijakan kurikulum nasional yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja, tetapi juga konsisten dalam meneguhkan nilai-nilai spiritual dan moral. Dalam konteks pendidikan Islam, konsistensi internalisasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum menjadi sangat penting sebagai benteng etis di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Kurikulum perlu dirancang secara integratif agar nilai-nilai Islam tidak tereduksi menjadi simbol normatif semata, melainkan terinternalisasi dalam sikap, perilaku, dan cara berpikir peserta didik (Ball 2020).

Dengan demikian, keterkaitan kebijakan kurikulum nasional dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Islam harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat substantif dan berkelanjutan. Kurikulum ideal bukan

hanya respons terhadap tuntutan zaman, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai fundamental bangsa dan ajaran agama. Kebijakan kurikulum yang konsisten, berbasis nilai, dan berorientasi jangka panjang diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga beriman, berakhlak mulia, dan memiliki tanggung jawab sosial sebagai warga negara dan sebagai insan beragama.

KESIMPULAN

Kebijakan kurikulum nasional merupakan instrumen strategis yang senantiasa menempati posisi prioritas dalam agenda pendidikan nasional karena perannya yang menentukan arah, tujuan, dan mutu pendidikan. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pedagogis, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang merefleksikan visi pembangunan bangsa. Dinamika perubahan kurikulum menunjukkan upaya negara dalam merespons tantangan sosial, perkembangan global, dan tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, perubahan yang terlalu cepat dan berulang tanpa evaluasi yang komprehensif berpotensi melemahkan konsistensi kebijakan dan efektivitas implementasi di tingkat satuan pendidikan.

Proses agenda setting kebijakan kurikulum nasional terbukti dipengaruhi secara signifikan oleh faktor politik, sosial, dan ideologis. Kepentingan politik pemerintahan, tuntutan sosial masyarakat, serta landasan ideologi negara saling berinteraksi dalam menentukan arah dan substansi kebijakan kurikulum. Interaksi tersebut menjadikan kurikulum sebagai arena kontestasi berbagai kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak selalu sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pendidikan jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika politik dan sosial menjadi penting agar kebijakan kurikulum tidak bersifat reaktif, melainkan berlandaskan perencanaan yang matang dan berkelanjutan.

Kebijakan kurikulum nasional juga memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan pendidikan nasional dan internalisasi nilai-nilai Islam. Kurikulum berfungsi sebagai sarana utama untuk mewujudkan pengembangan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, khususnya mayoritas Muslim, internalisasi nilai-nilai Islam menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan kurikulum idealnya mampu menjaga keseimbangan antara penguasaan kompetensi akademik, pengembangan keterampilan abad ke-21, dan penguatan nilai spiritual serta moral sebagai dasar pembentukan karakter bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2021. "The Concept of Education in Islam Revisited." *Journal of Islamic Philosophy*, ahead of print. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340045>.
- Apple, Michael W. 2021. "Ideology and Curriculum in Contemporary Education." *Journal of Curriculum Studies*, ahead of print. <https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1879863>.
- Ball, Stephen J. 2020. "The Education Policy Process and the Neoliberal Imaginary." *Critical Studies in Education*, ahead of print. <https://doi.org/10.1080/17508487.2020.1737554>.
- Biesta, Gert. 2020. "Reclaiming the Purpose of Education." *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, ahead of print. <https://doi.org/10.1007/s11092-020-09322-1>.
- Fitri, Agus Zaenul. 2023. "Kurikulum Dan Politik Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, ahead of print. <https://doi.org/10.21831/jkp.v12i1.56789>.
- Fullan, Michael. 2021. "Educational Change and Curriculum Reform in Uncertain Times." *Educational Researcher*, ahead of print. <https://doi.org/10.3102/0013189X211020203>.
- Haqiqi, MZ, H. Hilalludin, RB Limnata, and D. Nicklany. 2024. "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Sikap Simpati Dan Empati Antar Mahasiswa STIT Madani." *Student Research Journal* 2 (4): 172–81.
- Hilalludin, Hilalludin, Erna Dwi Maryani, Dedi Sugari, and Muhammad Farhan Rifky Afif. 2025. "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Generasi Z Di Indonesia." *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1 (03): 47–61.
- Huda, Miftachul. 2020. "Integrating Islamic Values in National Curriculum Policy." *International Journal of Ethics and Education*, ahead of print. <https://doi.org/10.1007/s40889-020-00106-5>.

- Januardi, H., and J. Jumadi. 2024. "Eksplorasi Nilai-Nilai Stoikisme Dalam Sudut Pandang Islam." *Tamadduna: Jurnal Peradaban*, 77–83.
- Kemdikbud. 2022. "Curriculum Reform and National Education Goals in Indonesia." *Indonesian Journal of Education Policy*, ahead of print. <https://doi.org/10.17509/ijep.v6i1.43210>.
- Kingdon, John W. 2021. "Agendas, Alternatives, and Public Policies Revisited." *Journal of Public Policy*, ahead of print. <https://doi.org/10.1017/S0143814X21000052>.
- Lingard, Bob. 2020. "Politics, Policy and Curriculum Reform." *Journal of Education Policy*, ahead of print. <https://doi.org/10.1080/02680939.2020.1756276>.
- Mahfud, Choirul. 2021. "Pendidikan Islam Dan Kebijakan Kurikulum Nasional." *Journal of Islamic Education Studies*, ahead of print. <https://doi.org/10.21580/jies.v6i2.7891>.
- Noor, Aminuddin. 2021. "Ideologi Pancasila Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional." *Civic Education Journal*, ahead of print. <https://doi.org/10.15294/cej.v5i2.45678>.
- Nuryatno, M. Agus. 2022. "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, ahead of print. <https://doi.org/10.14421/jpi.2022.112>.
- OECD. 2021. "Curriculum Reform and Policy Coherence." *OECD Education Working Papers*, ahead of print. <https://doi.org/10.1787/3b1e1c1e-en>.
- Priestley, Mark, Gert Biesta, and Sarah Robinson. 2020. "Curriculum Making as Social Practice: Complex Webs of Enactment." *The Curriculum Journal*, ahead of print. <https://doi.org/10.1002/curj.75>.
- Rahman, Fazlur. 2020. "Islamic Education and Moral Values in Modern Schooling." *Islamic Studies*, ahead of print. <https://doi.org/10.35632/islamiq.v59i2.229>.
- Rizvi, Fazal, and Bob Lingard. 2020. "Globalizing Education Policy: Implications for Curriculum Reform." *Educational Theory*, ahead of print. <https://doi.org/10.1111/edth.12408>.
- Sahlberg, Pasi. 2021. "Global Education Reform and Curriculum Change." *Educational Review*, ahead of print. <https://doi.org/10.1080/00131911.2021.1892704>.
- Sugari, Dedi, Hilalludin Hilalludin, Erna Dwi Maryani, and Abdul Hamid. 2025. "Peran Literasi Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik." *Al-Hudaya: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Pendidikan* 1 (04): 11–22.
- Wahyudin, MI, H. Hilalludin, and A. Haironi. 2024. "Peran Dosen Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa STIT Madani." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3 (3): 130–36.
- Young, Michael. 2020. "Curriculum Theory: What It Is and Why It Is Important." *Policy Futures in Education*, ahead of print. <https://doi.org/10.1177/1478210320902446>.
- Yusuf, Muhammad. 2024. "Pendidikan Islam Dan Tantangan Kurikulum Abad Ke-21." *Journal of Contemporary Islamic Education*, ahead of print. <https://doi.org/10.21093/jcie.v3i1.9123>.